



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Murung Raya menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

CARA PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. **AF Setiap Desa = $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$**

Keterangan:

AF Setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Rincian Pembagian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (Enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa atau APBDes Perubahan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa atau APBDesa perubahan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format Laporan Realisasi Pengguna Dana Desa prsemester dan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (6) Kepala desa wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penerima dana kedesa pertahap, sebagaimana lampiran III dalam Perauran Bupati ini.
- (7) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 229) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

| VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURUNG BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA | |
|---|-------|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA | f |
| ASISTEN. I | DL |
| KABAG HUKUM | f |
| KSB BAG. Per-44 | f |
| STAF PEMERIKSA MATERI | 3 yu |
| STAF PENDISTRIBUSIAN | 3 yu |

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


SYARKAWI. H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 231

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 APRIL 2016

TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MURUNG RAYAPEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA T.A. 2016

| NO | KECAMATAN | DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | BESARNYA DANA DESA(RP) |
|----|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 |
| 1 | MURUNG | 1 DIRUNG | 565.640.000 | 89.333.644 | 654.974.000 |
| | | 2 MALASAN | 565.640.000 | 105.381.365 | 671.021.000 |
| | | 3 BATU PUTIH | 565.640.000 | 110.049.415 | 675.689.000 |
| | | 4 PENYANG | 565.640.000 | 118.725.720 | 684.366.000 |
| | | 5 MANGKAHUI | 565.640.000 | 332.280.594 | 897.921.000 |
| | | 6 PANUUT | 565.640.000 | 67.996.211 | 633.636.000 |
| | | 7 MUARA UNTU | 565.640.000 | 162.469.806 | 728.110.000 |
| | | 8 MUARA JAAN | 565.640.000 | 60.104.952 | 625.745.000 |
| | | 9 BAHITOM | 565.640.000 | 233.344.589 | 798.985.000 |
| | | 10 DANAU USUNG | 565.640.000 | 70.666.020 | 636.306.000 |
| | | 11 JUKING PAJANG | 565.640.000 | 79.674.095 | 645.314.000 |
| | | 12 MUARA SUMPOI | 565.640.000 | 92.644.205 | 658.284.000 |
| | | 13 MUARA BUMBAN | 565.640.000 | 61.192.103 | 626.832.000 |
| | | JUMLAH I | | | 8.937.183.000 |
| 2 | TANAH SIANG | 1 SUNGAI LUNUK | 565.640.000 | 78.687.795 | 644.328.000 |
| | | 2 KONUT | 565.640.000 | 132.978.720 | 698.619.000 |
| | | 3 KARALI | 565.640.000 | 70.768.011 | 636.408.000 |
| | | 4 BELAWAN | 565.640.000 | 53.677.263 | 619.317.000 |
| | | 5 MANGKOLISOI | 565.640.000 | 49.218.334 | 614.858.000 |
| | | 6 KALANG KALUH | 565.640.000 | 49.881.584 | 615.522.000 |
| | | 7 MANTIAT PARI | 565.640.000 | 81.610.346 | 647.250.000 |
| | | 8 OSOM TOMPOK | 565.640.000 | 96.564.991 | 662.205.000 |
| | | 9 OLUNG ULU | 565.640.000 | 71.526.818 | 637.167.000 |
| | | 10 PURUK BATU | 565.640.000 | 56.511.745 | 622.152.000 |
| | | 11 OLONG SIRON | 565.640.000 | 63.368.302 | 629.008.000 |
| | | 12 TINO TALIH | 565.640.000 | 52.401.535 | 618.042.000 |
| | | 13 OLONG NANGO | 565.640.000 | 92.114.382 | 657.754.000 |
| | | 14 MAHANYAN | 565.640.000 | 54.087.231 | 619.727.000 |
| | | 15 DIRUNG BAKUNG | 565.640.000 | 50.433.813 | 616.074.000 |
| | | 16 TABULANG | 565.640.000 | 62.256.948 | 627.897.000 |
| | | 17 CANGKANG | 565.640.000 | 49.125.209 | 614.765.000 |
| | | 18 OLONG DOJOU | 565.640.000 | 49.015.106 | 614.655.000 |
| | | 19 DOAN ARUNG | 565.640.000 | 41.124.339 | 606.764.000 |
| | | 20 MUWUN | 565.640.000 | 65.658.374 | 631.298.000 |
| | | 21 NONO KLIWON | 565.640.000 | 70.032.831 | 635.673.000 |
| | | 22 KOLAM | 565.640.000 | 98.241.183 | 663.881.000 |
| | | 23 SARUHUNG | 565.640.000 | 41.062.367 | 606.702.000 |
| | | 24 OLONG SOLOI | 565.640.000 | 53.997.615 | 619.638.000 |
| | | 25 TOKUNG | 565.640.000 | 57.866.474 | 623.506.000 |
| | | 26 OLUNG BALO | 565.640.000 | 110.275.227 | 675.915.000 |
| | | JUMLAH II | | | 16.459.125.000 |
| 3 | TANAH SIANG SELATAN | 1 TAHUJAN ONTU | 565.640.000 | 67.155.508 | 632.796.000 |
| | | 2 DATAH KOTOU | 565.640.000 | 88.604.921 | 654.245.000 |
| | | 3 DIRUNG LINGKIN | 565.640.000 | 121.746.925 | 687.387.000 |
| | | 4 OLUNG HANANGAN | 565.640.000 | 89.911.269 | 655.551.000 |
| | | 5 ORENG | 565.640.000 | 69.309.501 | 634.950.000 |
| | | 6 OLUNG MURO | 565.640.000 | 142.902.263 | 708.542.000 |
| | | 7 PURUK KAMBANG | 565.640.000 | 20.712.598 | 586.353.000 |
| | | JUMLAH III | | | 4.559.824.000 |

| NO | KECAMATAN | DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | BESARNYA DANA DESA(RP) |
|----|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 |
| 4 | BARITO TUHUP RAYA | 1 BUMBAN TUHUP | 565.640.000 | 64.192.771 | 629.833.000 |
| | | 2 CINTA BUDIMAN | 565.640.000 | 71.883.677 | 637.524.000 |
| | | 3 MAKUNJUNG | 565.640.000 | 79.496.199 | 645.136.000 |
| | | 4 KOHONG | 565.640.000 | 47.565.579 | 613.206.000 |
| | | 5 DIRUNG SARARONG | 565.640.000 | 65.153.018 | 630.793.000 |
| | | 6 LIANG NYALING | 565.640.000 | 50.604.203 | 616.244.000 |
| | | 7 TUMBANG BAUH | 565.640.000 | 69.956.797 | 635.597.000 |
| | | 8 TUMBANG MASALO | 565.640.000 | 52.139.531 | 617.780.000 |
| | | 9 HINGAN TOKUNG | 565.640.000 | 60.007.150 | 625.647.000 |
| | | 10 BATU TOJAH | 565.640.000 | 71.483.323 | 637.123.000 |
| | | 11 TUMBANG BALOI | 565.640.000 | 60.472.149 | 626.112.000 |
| | | JUMLAH IV | | | 6.914.995.000 |
| 5 | LAUNG TUHUP | 1 MUARA LAUNG II | 565.640.000 | 160.977.252 | 726.617.000 |
| | | 2 BATU TUHUP | 565.640.000 | 63.207.284 | 628.847.000 |
| | | 3 TUMBANG BAHAN | 565.640.000 | 37.768.101 | 603.408.000 |
| | | 4 BERAS BELANGE | 565.640.000 | 37.832.481 | 603.472.000 |
| | | 5 BIHA | 565.640.000 | 58.023.880 | 623.664.000 |
| | | 6 DIRUNG PUNDU | 565.640.000 | 71.675.122 | 637.315.000 |
| | | 7 DIRUNG PINANG | 565.640.000 | 42.740.210 | 608.380.000 |
| | | 8 PELACI | 565.640.000 | 41.527.577 | 607.168.000 |
| | | 9 MUARA TUPUH | 565.640.000 | 151.853.219 | 717.493.000 |
| | | 10 TUMBANG BANA | 565.640.000 | 60.871.152 | 626.511.000 |
| | | 11 NARUI | 565.640.000 | 60.305.709 | 625.946.000 |
| | | 12 LAKUTAN | 565.640.000 | 56.035.293 | 621.675.000 |
| | | 13 MUARA MARUWEI I | 565.640.000 | 40.679.285 | 606.319.000 |
| | | 14 MUARA MARUWEI II | 565.640.000 | 43.045.882 | 608.686.000 |
| | | 15 TAWAI HAUI | 565.640.000 | 39.956.996 | 605.597.000 |
| | | 16 PENDA SIRON | 565.640.000 | 61.736.186 | 627.376.000 |
| | | 17 BATU BUA II | 565.640.000 | 64.122.442 | 629.762.000 |
| | | 18 BATU KARANG | 565.640.000 | 44.211.546 | 609.852.000 |
| | | 19 TAHUJAN LAUNG | 565.640.000 | 44.786.552 | 610.427.000 |
| | | 20 TUMBANG BONDANG | 565.640.000 | 212.393.161 | 778.033.000 |
| | | 21 TUMBANG TONDUK | 565.640.000 | 54.444.630 | 620.085.000 |
| | | 22 BERALANG | 565.640.000 | 54.392.045 | 620.032.000 |
| | | 23 KALANG DOHONG | 565.640.000 | 54.594.860 | 620.235.000 |
| | | JUMLAH V | | | 14.566.900.000 |
| 6 | PERMATA INTAN | 1 SUNGAI GULA | 565.640.000 | 76.437.155 | 642.077.000 |
| | | 2 SUNGAI BATANG | 565.640.000 | 69.636.978 | 635.277.000 |
| | | 3 TUMBANG SALIO | 565.640.000 | 56.530.502 | 622.171.000 |
| | | 4 PURNAMA | 565.640.000 | 64.163.160 | 629.803.000 |
| | | 5 SUNGAI LOBANG | 565.640.000 | 53.033.865 | 618.674.000 |
| | | 6 PANTAI LAGA | 565.640.000 | 89.748.959 | 655.389.000 |
| | | 7 BARATU | 565.640.000 | 53.959.758 | 619.600.000 |
| | | 8 JUKING SOPAN | 565.640.000 | 91.752.111 | 657.392.000 |
| | | 9 MUARA BABUAT | 565.640.000 | 153.316.057 | 718.956.000 |
| | | 10 SEI BAKANON | 565.640.000 | 75.492.225 | 641.132.000 |
| | | JUMLAH VI | | | 6.440.471.000 |
| 7 | SUNGAI BABUAT | 1 BATU MIRAU | 565.640.000 | 75.401.350 | 641.041.000 |
| | | 2 TAMBELUM | 565.640.000 | 95.991.482 | 661.631.000 |
| | | 3 TUMBANG BANTIAN | 565.640.000 | 61.743.810 | 627.384.000 |
| | | 4 TUMBANG SAAN | 565.640.000 | 68.646.732 | 634.287.000 |
| | | 5 TUMBANG KOLON | 565.640.000 | 53.936.942 | 619.577.000 |
| | | 6 TUMBANG APAT | 565.640.000 | 48.852.666 | 614.493.000 |
| | | JUMLAH VII | | | 3.798.413.000 |

| NO | KECAMATAN | DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | BESARNYA DANA DESA(RP) |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 |
| 8 | SUMBER BARITO | 1 KALAPEH BARU | 565.640.000 | 108.086.175 | 673.726.000 |
| | | 2 TUMBANG MASAO | 565.640.000 | 203.796.780 | 769.437.000 |
| | | 3 BATU MAKAP | 565.640.000 | 124.571.280 | 690.211.000 |
| | | 4 OLONG LIKO | 565.640.000 | 77.105.182 | 642.745.000 |
| | | 5 TUMBANG MOLUT | 565.640.000 | 77.719.504 | 643.360.000 |
| | | 6 TELUK JOLO | 565.640.000 | 110.406.206 | 676.046.000 |
| | | 7 LAAS BARU | 565.640.000 | 65.157.203 | 630.797.000 |
| | | 8 TUMBANG TUAN | 565.640.000 | 50.819.089 | 616.459.000 |
| | | JUMLAH VIII | | | 5.342.781.000 |
| 9 | SERIBU RIAM | 1 TAKAJUNG | 565.640.000 | 49.534.612 | 615.175.000 |
| | | 2 MUARA JOLOI 1 | 565.640.000 | 104.969.429 | 670.609.000 |
| | | 3 MUARA JOLOI 2 | 565.640.000 | 181.702.008 | 747.342.000 |
| | | 4 PARAHAU | 565.640.000 | 41.536.138 | 607.176.000 |
| | | 5 TUMBANG JOJANG | 565.640.000 | 60.558.502 | 626.199.000 |
| | | 6 TUMBANG NAAN | 565.640.000 | 99.692.430 | 665.333.000 |
| | | 7 TUMBANG TOHAN | 565.640.000 | 80.430.034 | 646.070.000 |
| | | JUMLAH IX | | | 4.577.904.000 |
| | | 10 | U'UT MURUNG | 1 TUMBANG OLONG I | 565.640.000 |
| 2 TUMBANG OLONG II | 565.640.000 | | | 48.085.735 | 613.726.000 |
| 3 KALASIN | 565.640.000 | | | 92.403.924 | 658.044.000 |
| 4 TUMBANG TUJANG | 565.640.000 | | | 136.293.945 | 701.934.000 |
| 5 TUMBANG TOPUS | 565.640.000 | | | 42.201.426 | 607.841.000 |
| JUMLAH X | | | | | 3.247.842.000 |
| TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X | | | | | 74.845.438.000 |

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

| | |
|---|-------|
| VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA | |
| PEJABAT | PAMAF |
| SEKDA | |
| ASISTEN I | DL |
| KASAG | |
| KSB BAG Perw | |
| STAF PEMERIKSA MATERI | |
| STAF PENDISTRIBUSIAN | 3. yu |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 APRIL 2016

**TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Pagu Desa : Rp.

| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. 6=4-5 | KET. 7 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------|
| 1. | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.2 | <i>Pendapatan Transfer</i> | | | | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | | | | |
| | - TAHAP PERTAMA | | | | | |
| | - TAHAP KEDUA | | | | | |
| | - TAHAP KE TIGA | | | | | |
| 2. | BELANJA BANTUAN KE DESA | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | |
| | JUMLAH | | | | Rp. | |

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

VERIFIKASI / UJI PETIK
PRODUK HUKUM DAERAH
LINGKUP PEMDA MURA
BAGIAN HUKUM SETDA
KAB MURUNG RAYA

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|-------|
| SEKDA | f |
| ASISTEN. I | DL |
| KABAG HUKUM | f |
| KAB. BAG. per-uce | lf |
| STAF PEMERIKSA MATERI | 3 yu |
| STAF PENDISTRIBUSIAN | |

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 APRIL 2016
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DESA.....
KECAMATAN.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor tanggal.....Pebruari 2016 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan.....Desa.....

Dengan ini menyatakan :

- 1. Telah benar menerima Dana Desa Tahap..... Tahun Anggaran 2016 yang disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa.....
- 2. Bersungguh-sungguh mempergunakan dana Dana Desa Tahap TA. 2016 berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap penggunaan keuangan tersebut maka saya bersedia mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat menjadi bahan dan proses selanjutnya.

..... 2016

Kepala Desa.....

Metrai 6000

.....

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

| VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA | |
|---|-------|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA | f |
| ASSTEN I | DL |
| KABANG GUBUK | f |
| KSB PAG. per-ua | f |
| STAF PEMERIKSA MATERI | g yu |
| STAF PENDISTRIBUSIAN | g yu |

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 APRIL 2016

**TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI | LEBIH/KURANG (Rp) | Ket |
|---------------|---|---|----|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | | | | PENDAPATAN DESA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Laba BUMDesa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Kas Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Bengkok/Lungguh | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Pengarem-arem | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Pasar Hewan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Bangunan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Kios Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Gedung Pertemuan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Gedung Olah Raga Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Bangunan Desa Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Hutan Milik Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Mata Air Milik Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Pemandian Umum | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Obyek Rekreasi Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Lapangan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Aset Desa Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Swadaya dan Partisipasi | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Gotong Royong | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa selain Tanah yang dipisahkan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Hasil Pelepasan Tanah Desa tahun berjalan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 1 | 4 | 4 | Bunga Simpanan Uang di Bank | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 2 | 6 | | Penghasilan Tetap Aparat Desa dan BPD | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |

| KODE REKENING | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI | LEBIH/KURANG (Rp) | Ket |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | | | | BELANJA DESA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Staf Pemerintah Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Tunjangan dan Insentif Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Tunjangan Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | - Tunjangan Kesehatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | - Tunjangan Kecelakaan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | - Tunjangan Kematian | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | - Tunjangan lain-lain | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Insentif Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | - Insentif Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Operasional Kepala Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Operasional Perangkat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Operasional Sekretaris Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Bendahara Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Pembantu Bendahara | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Pengurus Barang Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Penyimpan Barang Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Bahan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Perlengkapan Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Peralatan Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Jasa Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Telepon | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Air | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Listrik | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Surat Kabar/Majalah | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Perangko/Materai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pemeliharaan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pemeliharaan Komputer | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pemeliharaan Laptop | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Penggandaan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Cetak dan Jilid | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Sewa Meja dan Kursi | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Sewa Tenda | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Sewa Sound System | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Aparat Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Harian | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Peninjauan | Rp - | Rp - | Rp - | |

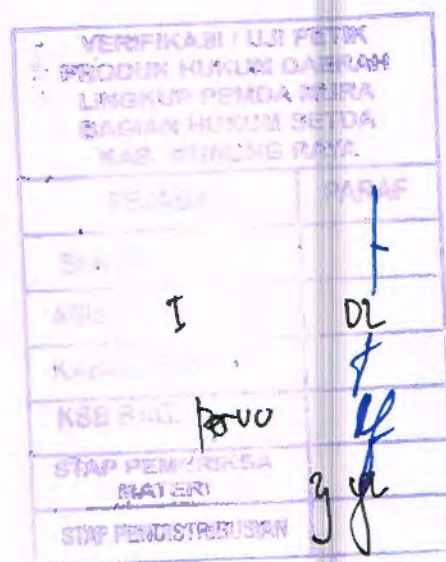
| KODE REKENING | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | | JUMLAH REALISASI | | LEBIH/KURANG (Rp) | Ket |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---------------------|---|----------------------|-----|
| 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pakaian Dinas | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa (PDH) | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Baju Batik Kepala Desa | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Baju Batik Perangkat Desa | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Pakaian Dinas Linmas | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparat Desa | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Upah Tenaga Kerja | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal Tanah | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal Angkutan Darat Roda 2 | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Komputer/Note Book/Laptop | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Printer | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Meja Kursi | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Lemari | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | | Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Belanja Pegawai | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan Ketua BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan Wakil Ketua BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan Sekretaris BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan Anggota BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Bahan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Perlengkapan Kantor | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Peralatan Kantor | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Penggandaan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Cetak dan Jilid | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Minuman Harian | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Pakaian Dinas | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pakaian Batik Anggota BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pakaian Dinas Anggota BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Pakaian Olah Raga BPD | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Belanja Modal | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Belanja Komputer Note Book | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 3 | 3 | Belanja Laptop | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 4 | | Pembayaran Insentif RT/RW dan Operasional RT/RW | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Belanja Pegawai | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Insentif RT/RW | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Insentif RT | Rp | - | Rp | - | Rp | - |
| 2 | 1 | 4 | 1 | Insentif RW | Rp | - | Rp | - | Rp | - |

| KODE REKENING | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI | LEBIH/KURANG (Rp) | Ket |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | | Kegiatan Perbaikan Jalan Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Honorarium TPK | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | Honorarium PPHP | Rp - | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Penggandaan | Rp - | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Cetak | Rp - | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | Kegiatan Pengecatan Kantor Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Pustu | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | | Kegiatan Pembangunan Jembatan RT.01 | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | Honorarium TPK | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | Honorarium PPHP | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | | Kegiatan Pembangunan Penyebrangan Motor RT.03-RT.04 | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | | Kegiatan Pembangunan Pagar Teras Kantor Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 6 | 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | | | | | | |

| KODE REKENING | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI | LEBIH/KURANG (Rp) | Ket |
|---------------|---|-----|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | 2 | 8 | Kegiatan Biaya Perbaikan Sarana Air Bersih | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 3 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 3 | Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 3 | Sewa Alat Berat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 3 | Belanja Sewa Excavator | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 3 | Belanja Sewa Back Hoe Loader | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 2 | 8 4 | Belanja Modal | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Belanja Bahan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Bantuan Keuangan kepada Lembaga Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Bantuan Keuangan kepada PKK | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Bantuan Keuangan kepada POSYANDU | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Belanja Bantuan Sosial | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 3 | 1 2 | Bantuan Sosial Hari Besar Keagamaan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 1 | Belanja Pegawai | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 1 | Honorarium Kegiatan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 2 | Belanja Bahan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 2 | Upah Tenaga Kerja | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 4 | 1 2 | Honorarium Narasumber/Ahli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 6 | | BIDANG TAK TERDUGA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 6 | 1 1 | Bantuan Keadaan Darurat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 2 | 6 | 1 2 | Bantuan atau Santunan Kematian | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | JUMLAH BELANJA | Rp - | Rp - | Rp - | |
| | | | SURPLUS/DEFISIT | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 3 | | | PEMBIAYAAN | - | - | - | |
| 3 | 1 | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3 | 1 | 1 | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | | | | |
| | | | JUMLAH (Rp.) | | | | |
| 3 | 2 | | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| 3 | 2 | 3 | Pembayaran Utang Desa | - | - | - | |
| | | | JUMLAH (Rp.) | - | - | - | |

..... 2016

Kepala Desa



BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE